

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2020
No Kontrak Penelitian: 01/PL/SPK/PNP/FISIP-UNAND/2020
Tanggal: 1 September 2020**



**ANALISIS KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19
PADA KELOMPOK PEREMPUAN DI KOTA PADANG**

Oleh :

- 1. Wewen Kusumi Rahayu, S.A.P, M.Si (Ketua)**
- 2. Dewi Anggraini, SIP, M.Si (Anggota)**
- 3. Lara Tria Monica (Anggota)**

**NIDN: 0014058601
NIDN: 0028108109
BP: 1710843019**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Analisis Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 pada Kelompok Perempuan di Kota Padang
2. Bidang Penerapan : Sosial
3. Ketua Pelaksana
- a. Nama : Wewen Kusumi Rahayu, S.A.P, M.Si
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. NIP : 19860514 201012 2 006
 - d. Pangkat/golongan : Penata / III C
 - e. Jabatan : Lektor
 - f. Disiplin Ilmu : Sosial
 - g. Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 - h. Universitas : Universitas Andalas
 - i. Telepone : 081325052826
4. Mata kuliah yang diampu : Teori Administrasi Publik
5. Anggota Tim Penelitian : 2 orang
Nama Anggota Dewi Anggraini, SIP, M.Si
Lara Tria Monica
6. Lokasi Penelitian : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang
7. Biaya : Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah)
8. Sumber dana : Dana Rutin FISIP

Padang, 20 November 2020

Mengetahui :

Ketua Program Studi,



Peneliti,

Wewen Kusumi Rahayu, S.A.P, M.Si
NIP 198605142010122006

Menyetujui,
Dekan FISIP Univ. Andalas



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Urgensi Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
2.1 Pengarusutamaan Gender (PUG)	9
2.2 Teknik Analisis dengan Model <i>Gender Analysis Pathway</i> (GAP) .	10
2.3 <i>Road Map</i> Penelitian	13
BAB III METODE PENELITIAN	14
3.1 Jenis dan Sumber Data.....	14
3.2 Teknik Pengumpulan Data dan Informan	14
3.3 Instrumen Penelitian	15
3.4 Analisis Data.....	15
BAB IV PEMBAHASAN	17
4.1 Analisis Kebijakan Responsif Gender	18
4.1.1 Tujuan dan Sasaran Program	18
4.1.2 Data Pembuka yang Terpilah.....	19
4.1.3 Faktor Penyebab Kesenjangan Gender	22
4.2 Formulasi Kebijakan Responsif Gender	24
4.3 Rencana Aksi Responsif Gender	25
BAB V PENUTUP.....	26

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA TIM PENELITIAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penyebaran Kasus Covid-19 di Kota Padang pada Bulan Juni-Juli 2020	2
Tabel 4.1 Data Pembuka Kondisi kasu Covid-19 di Kota Padang Pada Bulan April-September 2020	19
Tabel 4.2 Data Terpilah Kasus Covid-19 di Kota Padang.....	20
Tabel 4.3 Jenis Pekerjaan yang Terdampak Virus Covid-19 berdasarkan Pekerjaan.....	21

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Gender <i>Analysis Pathway</i> (Alur Kerja Analisis Gender)	12
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini kondisi dunia sedang tidak baik-baik saja, akibat menyebarnya Virus Covid-19 yang pada akhirnya menjadi pandemi di banyak negara. Pada mulanya dunia dikejutkan dengan kasus infeksi pada paru-paru yang teridentifikasi berasal dari infeksi baru Corona Virus (Covid-19) di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Infeksi akibat virus ini menyebar sangat cepat ke berbagai kota bahkan berbagai negara. Tidak terkecuali Indonesia, juga menjadi salah satu negara yang menjadi tempat menyebarnya wabah virus tersebut. Perkembangan virus covid-19 yang sangat cepat dan mudah menular tentunya mempengaruhi bahkan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tercatat hingga 27 April 2020 terdapat 100.303 orang yang dinyatakan positif covid-19 di Indonesia dan 4.838 orang diantaranya meninggal dunia¹. Di Provinsi Sumatera Barat hingga tanggal 27 Juli 2020 terdapat 869 kasus positif dan 33 kasus diantaranya meninggal dunia. Kasus positif terbanyak berasal dari Kota Padang, tercatat hingga 27 Juli 2020 terdapat 606 kasus positif covid-19 dan 25 kasus diantaranya meninggal dunia dan 513 kasus dinyatakan sembuh dari virus covid-19². Melihat tingginya angka kasus positif covid-19 di Kota Padang, tentunya menuntut keseriusan semua pihak dalam menyikapi hal ini. Data penyebaran kasus covid-19 di Kota Padang pada setiap kelurahan dan kecamatan dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut;

¹ www.jpnn.com/news/27-Juli-2020/21.10 wib

² www.corona.padang.go.id/27-Juli-2020/21.23 wib

Tabel 1.1
Penyebaran Kasus Covid-19 di Kota Padang pada Bulan Juni-Juli 2020

Lokasi	Positif	Meninggal	Sembuh	Sisa
Kec. Padang Utara	38	2	33	3
Alai Parak Kopi	11	0	9	2
Ulak Karang Selatan	6	2	4	0
Gunung Pangilun	6	0	6	0
Ulak Karang Utara	5	0	5	0
Air Tawar Barat	4	0	4	0
Air Tawar Timur	4	0	3	1
Lolong Belanti	2	0	2	0
Kec. Padang Barat	54	2	49	3
Purus	11	0	11	0
Padang Pasir	11	0	11	0
Kampung Jao	8	2	5	1
Flamboyan Baru	8	0	8	0
Rimbo Kaluang	6	0	5	1
Ujung Gurun	5	0	5	0
Kampung Pondok	3	0	3	0
Berok Nipah	2	0	1	1
Kec. Padang Timur	99	5	75	19
Andalas	19	1	14 (+1)	4
Sawah an	16	1	15 (+1)	0
Kubu Dalam Parak Karakah	13	0	12	1
Kubu Marapalam	10	2	2	6
Simpang Haru	8	1	6	1
Jati Baru	8	0	7	1
Jati	7	0	7	0
Ganting Parak Gadang	7	0	4	3
Parak Gadang Timur	6	0	5	1
Sawah an Timur	5	0	3	2
Kec. Padang Selatan	45	4	37	4

Mata Air	20	2	18	0
Pasa Gadang	10	0	10	0
Alang Laweh	4	1	1	2
Rawang	4	1	1	2
Seberang Palinggam	4	0	4	0
Seberang Padang	2	0	2	0
Ranah Parak Rumbio	1	0	1	0
Kec. Nanggalo	32	2	27	3
Kurao Pagang	16	2	14	0
Surau Gadang	12	0	10 (+1)	2
Kampung Lapai	3	0	3	0
Tabing Banda Gadang	1	0	0	1
Kec. Kuranji	108	3	97	8
Kuranji	51	1	48	2
Lubuk Lintah	11	1	10 (+2)	0
Pasar Ambacang	10	0	10 (+1)	0
Kalumbuk	10	0	9	1
Korong Gadang	9	0	7	2
Gunung Sarik	7	0	5	2
Ampang	6	1	5	0
Anduring	3	0	2	1
Sungai Sapih	1	0	1	0
Kec. Pauh	50	0	44	6
Piai Tengah	14	0	14	0
Pisang	14	0	13	1
Limau Manis Selatan	9	0	5	4
Limau Manis	4	0	4	0
Koto Luar	3	0	3	0
Binuang Kampung Dalam	2	0	2	0
Cupak Tengah	2	0	2	0
Kapalo koto	2	0	1	1
Kec. Lubuk Begalung	86	2	72	12
Pagambiran Ampalu	22	0	20	2

Banuaran	15	1	14	0
Batuang Taba	8	1	3 (+1)	4
Cengkeh	8	0	7	1
Parak Laweh Pulau Air	7	0	5	2
Kampung Baru	6	0	6	0
Lubuk Begalung	4	0	4	0
Koto Baru	3	0	3	0
Gurun Laweh	3	0	3	0
Tanah Sirah Piai	3	0	3	0
Kampung Jua	2	0	2	0
Gates	2	0	1	1
Pampangan	2	0	0	2
Pitameh Tanjung Saba	1	0	1	0
Kec. Lubuk Kilangan	22	0	19	3
Indarung	12	0	10	2
Bandar Buat	6	0	5	1
Koto Lalang	2	0	2	0
Batu Gadang	2	0	2	0
Kec. Koto Tengah	66	5	57	4
Lubuk Buaya	12	1	10	1
Balai Gadang	8	1	7	0
Parupuk Tabing	7	1	6	0
Dadok Tunggul Hitam	7	0	6	1
Batipuh Panjang	7	0	5	2
Pasie Nan Tigo	5	1	4	0
Padang Sarai	5	0	5	0
Koto Panjang Ikur Koto	5	0	5	0
Bungo Pasang	4	0	4	0
Batang Kabung Ganting	3	1	2	0
Lubuk Minturun Sungai Lareh	2	0	2	0
Koto Pulai	1	0	1	0
Kec. Bungus Teluk Kabung	6	0	3	3
Bungus Barat	5	0	2	3

Bungus Timur	1	0	1	0
Total	606	25	513	68

Sumber; www.corona.padang.go.id, 27 Juli 2020, 22.10 wib

Di Kota Padang juga telah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga tahap III dan berakhir pada 7 Juni 2020. Namun, Pemerintah Kota Padang tidak segera memberlakukan era normal baru, melainkan memberlakukan masa transisi yang diterapkan selama satu minggu pada 8 Juli 2020 sampai 13 Juli 2020. Masa transisi ini dimaksudkan sebagai masa sosialisasi mengenai pola hidup baru ditengah kondisi pandemi. Untuk mendukung pola hidup baru tersebut, maka Pemerintah Kota Padang membuat Peraturan Wali Kota (Perwako) No. 49 tahun 2020 tentang Pola Hidup Baru pada Masa Pandemi Covid-19. Perwako ini mengatur mengenai tata cara pencegahan dan pengendalian penularan virus covid-19, fokusnya pada kegiatan masyarakat pada sektor ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, keagamaan, transportasi dan pelayanan publik. Bidang-bidang kegiatan yang menjadi fokus kajian Perwako No. 49 tahun 2020 tersebut, merupakan bidang kehidupan masyarakat yang mendapatkan efek terburuk akibat adanya virus covid-19.

Untuk bidang perekonomian, menurut data dari Dinas Tenaga Kerja Sumatera Barat, hingga bulan Juni terdapat 1.299 pekerja di Kota Padang kehilangan pekerjaannya, terdiri dari sektor swasta, UMKM bahkan juga sektor publik. Kasus virus covid-19 juga berdampak kepada bidang pendidikan, semua jenjang pendidikan terpaksa harus meliburkan sekolah dan merubah sistem pembelajaran dengan sistem virtual atau *online*. Tentunya kondisi ini bukanlah hal yang mudah bagi masyarakat Kota Padang khususnya, karena tidak semua masyarakat memiliki kemampuan dalam mendampingi anak-anak mereka untuk belajar secara *online* ditambah dengan keterbatasan alat, dana dan juga jaringan internet. Akibatnya, tidak sedikit dari masyarakat yang mengakui terjadinya penurunan konsentrasi anak dalam belajar dari rumah (*online*).

Bidang kehidupan sosial, budaya masyarakat juga mengalami perubahan yang signifikan akibat adanya virus covid-19. Masyarakat Kota Padang dipaksa membatasi ruang gerak bersosial, sehingga sering kita temukan masyarakat yang pada akhirnya tidak pergi melayat ke rumah tetangga yang sedang kemalangan, tidak saling mengunjungi untuk bersilaturahmi walaupun sesama teman bahkan keluarga. Hal ini tentunya untuk mencegah penyebaran virus covid-19.

Melihat kenyataan tersebut, maka dalam upaya mempersiapkan pemerintah daerah dan masyarakat untuk hidup dalam kondisi era normal baru, maka dalam Perda No.49 Tahun 2020 memuat protokol kesehatan dalam berkegiatan pada bidang-bidang kehidupan tersebut. Penekanannya lebih kepada kedisiplinan masyarakat untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak dan penerapan pola hidup sehat lainnya untuk meningkatkan imun atau daya tahan tubuh. Protokol kesehatan ini diterapkan di sekolah atau lembaga pendidikan, di tempat kerja, tempat ibadah, fasilitas umum, transportasi publik bahkan juga kehidupan di dalam keluarga.

Dalam kondisi pandemi ini, menurut WHO ada beberapa kelompok yang dianggap rentan atau mudah tertular virus covid-19, seperti; orang lanjut usia, perempuan dan anak-anak, penderita penyakit kronis dan ibu hamil. Maka tentunya dalam pencegahan penyebaran virus covid-19 harus menerapkan strategi yang mempertimbangkan kondisi kelompok tersebut. Di Kota Padang, dengan adanya Perwako no. 49 tahun 2020 seharusnya memuat strategi khusus untuk kelompok rentan, namun kenyataannya hal ini masih terlupa oleh pemerintah daerah.

Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang diharapkan mampu merumuskan kebijakan dan strategi yang menasar kelompok perempuan dan anak-anak dalam pencegahan penyebaran virus covid-19. Penelitian ini akan memfokuskan kepada bagaimana kebijakan atau strategi yang dirumuskan oleh pemerintah daerah melalui DP3AP2KB dalam pencegahan penyebaran virus covid-19 khususnya pada kelompok perempuan. Pemilihan kelompok perempuan adalah dengan pertimbangan

belum terdapatnya data terpilah mengenai masyarakat yang terdampak virus covid-19. Serta mengingat perempuan lebih memiliki aktifitas sosial di luar rumah yang lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Relasi gender harus tetap menjadi perhatian khusus dalam upaya memaksimalkan pencegahan penyebaran virus covid-19.

Kita masih banyak melihat pedagang dan pengunjung yang berjualan di pasar raya adalah kaum perempuan, bahkan untuk kehidupan bersosial seperti takziah dan pesta di Kota Padang, masih didominasi oleh kaum perempuan. Artinya, perempuan juga memiliki volume aktifitas di luar rumah yang sama dengan laki-laki. Kondisi fisik atau imunitas tubuh perempuan yang mungkin saja tidak sekuat laki-laki menjadikan mereka sebagai kelompok yang rentan atau mudah tertular virus covid-19.

Melihat kondisi ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 di Kota Padang”

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti akan memfokuskan kepada bagaimana Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam upaya pencegahan penyebaran virus covid-19 pada kelompok perempuan di Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pengarusutamaan Gender pada kebijakan upaya pencegahan penyebaran virus covid-19 di Kota Padang.

1.4 Urgensi Penelitian

Dengan masih tingginya angka kasus positif Covid-19 di Kota Padang, maka menuntut partisipasi aktif semua pihak untuk terlibat. Baik pemerintah daerah selaku aktor pelaksana maupun masyarakat sebagai kelompok sasaran. Oleh karena itu, dirasa sangat perlu merumuskan kebijakan ataupun strategi untuk mengupayakan pencegahan penyebaran virus covid-19 khususnya pada kelompok perempuan. Pemilihan kelompok perempuan didasari pada pernyataan WHO yang menetapkan perempuan sebagai kelompok rentan tertular virus covid-19. Harapannya tentu memberikan masukan atau road map penyusunan kebijakan atau strategi dalam memaksimalkan upaya pencegahan pada kelompok perempuan tersebut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan salah satu strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Dalam Inpres No. 9 tahun 2000 lebih sederhana dimaksudkan bahwa PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender mejadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.

Tujuan PUG diantaranya adalah memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok yang mengalami marginalisasi sebagai dampak dari bias gender, memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses, partisipasi dan kontrol yang sama terhadap pembangunan, dan meningkatkan sensitivitas gender berbagai pihak. Tujuan PUG adalah memastikan apakah perempuan dan laki-laki memperoleh akses terhadap, berpartisipasi dalam, mempunyai kontrol atas, dan memperoleh manfaat yang sama dalam pembangunan (Inpres No.9 Tahun 2000 tentang PUG).

Pemerintah menerapkan PUG dengan harapan bahwa pemerintah akan lebih efisien dan lebih efektif di dalam menghasilkan kebijakan dan dampak pembangunan yang lebih adil baik untuk laki-laki maupun perempuan, memberikan kesempatan dan pengakuan yang sama di masyarakat kepada laki-laki dan perempuan, yang berarti pula kehidupan sosial-ekonomi-politik Indonesia pun menjadi lebih kuat. Salah satu kunci dari PUG adalah partisipasi masyarakat secara aktif.

Penyelenggaraan PUG mencakup baik pemenuhan kebutuhan praktis gender maupun pemenuhan kebutuhan strategis gender. Kebutuhan praktis gender adalah kebutuhan-kebutuhan perempuan agar dapat menjalankan peran-peran sosial yang diperankan oleh mereka untuk merespon kebutuhan jangka pendek. Misalnya perbaikan taraf kehidupan, perbaikan pelayanan kesehatan, penyediaan lapangan kerja, penyediaan air bersih dan pemberantasan buta aksara. Kebutuhan strategis gender adalah kebutuhan-kebutuhan perempuan yang berkaitan dengan perubahan sub-ordinasi perempuan terhadap laki-laki, seperti perubahan di dalam pembagian peran, pembagian kerja, kekuasaan dan kontrol terhadap sumber daya. Kebutuhan strategis gender ini, misalnya perubahan atau penyempurnaan hukum, dan persamaan upah untuk jenis pekerjaan yang sama.

Indikator kesuksesan PUG adalah:

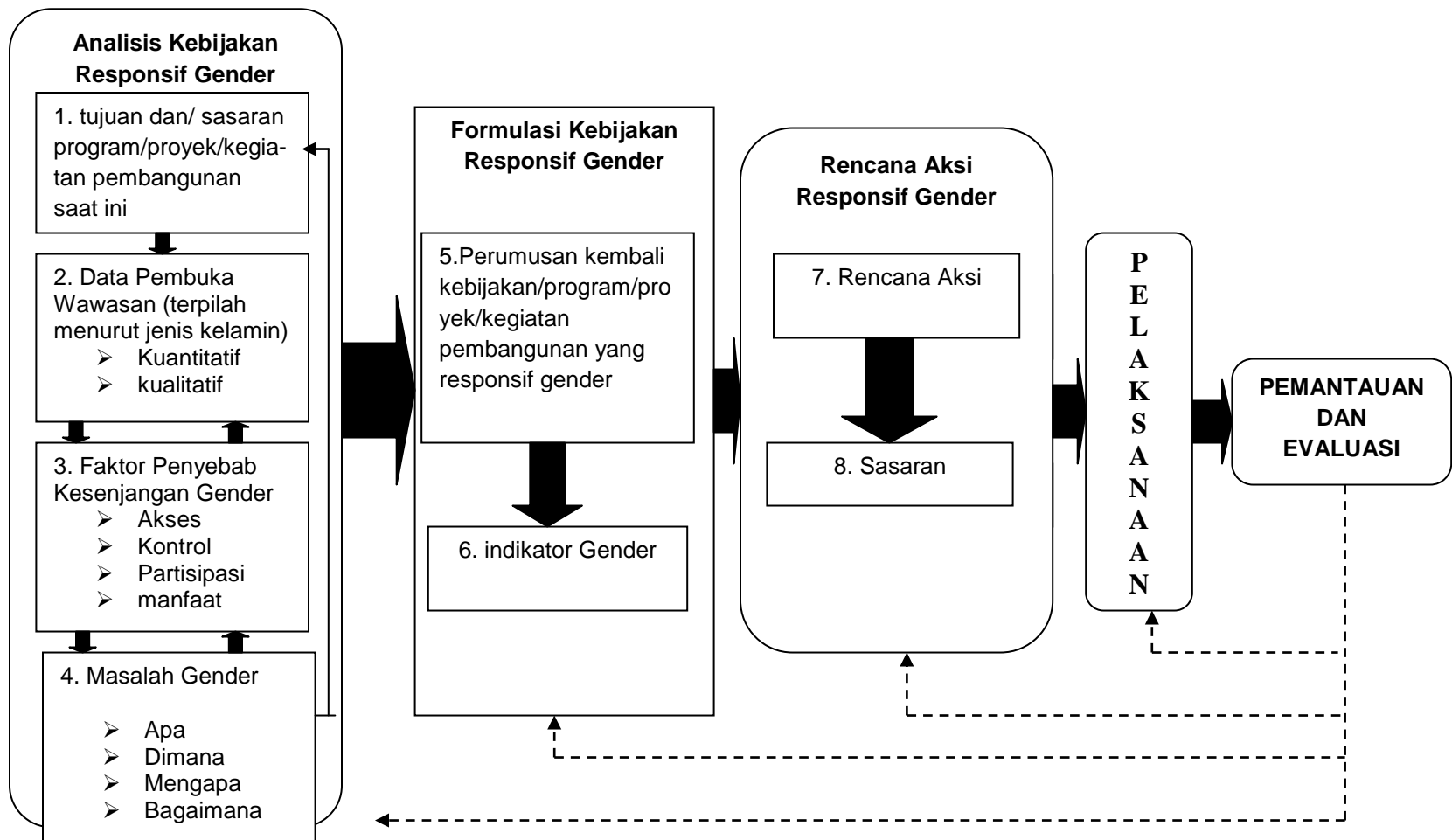
1. Komitmen politik.
2. Kerangka kebijakan.
3. Struktur dan mekanisme pemberdayaan.
4. Sumber daya.
5. Sistem informasi dan data.
6. Alat analisis.
7. Masyarakat madani.

2.2 Teknik Analisis dengan Model Gender Analysis Pathway (GAP).

Teknik ini digunakan untuk menganalisis data pada tataran medium dan makro (khususnya menyangkut kebijakan). Teknik ini digunakan untuk memahami kesenjangan gender dengan melihat aspek akses peran, manfaat dan kontrol yang diperoleh laki-laki dan perempuan dalam program pembangunan. Dalam penelitian ini memfokuskan pada bidang pendidikan.

Teknik Model Gender Analysis Pathway (GAP) adalah sebagai berikut (Panduan Pelaksanaan Inpres No.9 tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional, 2002;37):

BAGAN
GENDER ANALYSIS PATHWAY (ALUR KERJA ANALISIS GENDER)



2.3 Road Map Penelitian



Dari alur *fishbone* tersebut terlihat bahwa tren penelitian yang telah dan akan dilakukan adalah berfokus pada proses tahapan kebijakan publik. Mengingat salah satu fokus dan konsentrasi kajian Ilmu Administrasi Publik ada pada ranah Kebijakan Publik. Terlihat bahwa penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah menganalisis proses Formulasi (perumusan) dan proses Implementasi (pelaksanaan) kebijakan publik.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe analisis deskriptif. Sumber data penelitian ini dibedakan atas data primer dan sekunder. Menurut Lofland (dalam Moleong 2005:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan berupa dokumen dan lain-lain.

1. Data Primer

Data primer merupakan data asli yang diperoleh langsung dari sumbernya atau informan, yang dilakukan melalui wawancara. Pengambilan data primer akan dilakukan secara *purposive sampling*.

2. Data sekunder

Menurut Sugiyono (2004:156) sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi. Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari bahan kepustakaan, yaitu dokumen, laporan, atau arsip mengenai kebijakan dan strategi yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

3.2 Teknik Pengumpulan Data dan informan

Pada penelitian kualitatif, proses pengumpulan data bergerak dari fakta empiris dalam rangka membangun teori. Proses pengumpulan data ini menurut Nasution (dalam Mursalin 2002), meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1. Proses memasuki lokasi penelitian. Pada tahap ini peneliti memasuki lokasi yaitu Kota Padang dan fokus pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)
2. Berada di lokasi penelitian. Pada tahap ini peneliti menjalin hubungan pribadi dengan subjek penelitian, mencari informasi yang lengkap dan dibutuhkan dari informasi dan pengamatan yang diperoleh.
3. Mengumpulkan data. Peneliti memasuki tahapan mengumpulkan data melalui:
 - a. Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan yang diwawancarai. Model yang digunakan adalah

wawancara terstruktur berdasarkan pada pedoman wawancara, serta wawancara yang tidak terstruktur untuk mengembangkan hal-hal yang memerlukan informasi mendalam.

- b. Dokumentasi. Pengumpulan data dengan menghimpun, mempelajari berbagai informasi dokumentasi berupa dokumen-dokumen atau catatan-catatan kearsipan terkait dengan lokasi penelitian.

Adapun Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian dan terlibat langsung.

3.3 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan peneliti dalam memperoleh dan mengumpulkan informasi dalam penelitian. Adapun instrumen dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti sendiri. Menggunakan panca indera dalam melakukan pengamatan dan pengumpulan data secara langsung yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Catatan lapangan dan alat tulis. Untuk menghimpun data-data dalam penelitian dan menghindari kesalahan terhadap pengamatan yang dilakukan.
3. Pedoman wawancara.

3.4 Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan analisis data menurut Miles dan Huberman yang diterjemahkan oleh Rohidi (1992), yang terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu:

1. Reduksi data.
Adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengordinasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan final menggambarkan tentang kebijakan pengarusutamaan gender yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh DP3AP2KB Kota Padang.
2. Penyajian Data.
Merupakan kumpulan informasi tersusun dan memberikan penarikan kesimpulan, dan pengambilan tindakan berdasarkan data yang telah disajikan tentang tema penelitian.
3. Penarikan kesimpulan / verifikasi.
Suatu jalinan atau rangkaian pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, membangun wawasan umum yang disebut analisis. Verifikasi merupakan kegiatan pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran peneliti, mencatat suatu tinjauan

ulang pada catatan-catatan lapangan. Verifikasi data dalam penelitian ini dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, untuk menganalisis dan mencari makna dari informasi yang dikumpulkan. Dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi maka diperoleh kesimpulan yang *grounded*.

BAB IV

PEMBAHASAN

Kondisi berkembangnya virus covid-19 dan menjadi pandemi diberbagai wilayah menuntut keterlibatan aksi semua pihak guna menghentikan penyebaran virus tersebut. Di Kota Padang, usaha tersebut diawali dengan 3 langkah besar yang sudah dimulai pada awal Maret 2020 lalu. Tiga langkah tersebut adalah; membentuk Satuan Tugas Mitigasi Bencana, sosialisasi protokol kesehatan, dan pengawasan pelaksanaan kebiasaan pola hidup baru. Langkah-langkah ini bertujuan untuk melakukan pencegahan penyebaran virus covid-19 khususnya di Kota Padang. Upaya pencegahan ini melibatkan semua stakeholders pada tingkat kota, kelurahan hingga masyarakat langsung secara aktif.

Kota Padang menerapkan kebiasaan pola hidup baru dengan mengeluarkan kebijakan Perwako No. 49 Tahun 2020. Kebijakan ini mengatur tentang tata cara pencegahan dan pengendalian penularan virus covid-19, yang berfokus pada kegiatan masyarakat pada sektor ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, keagamaan, transportasi dan pelayanan publik. Bidang-bidang kegiatan yang menjadi fokus kajian Perwako No. 49 tahun 2020 tersebut, merupakan bidang kehidupan masyarakat yang mendapatkan efek terburuk akibat adanya virus covid-19. Hampir disemua bidang tersebut juga memberikan dampak terhadap kelompok rentan, terutama pada kelompok perempuan. Hal ini disebabkan karena perempuan masih melakukan kegiatan di luar rumah dengan kondisi fisik yang berbeda dari laki-laki. Karena kondisi inilah maka pemerintah daerah dituntut untuk lebih jeli dalam merumuskan strategi pencegahan penyebaran covid-19 ini.

Organisasi perangkat daerah (OPD) yang diberikan kewenangan dalam pengurusan permasalahan kelompok perempuan adalah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Pada kondisi saat ini, maka DP3AP2KB dituntut agar membuat strategi yang bisa membantu kelompok perempuan agar tetap beraktifitas pada sektor publik dengan tetap mendapatkan kenyamanan agar terhindar dari penyebaran virus covid-19.

Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh DP3AP2KB dalam mencegah penyebaran Virus Covid-19 pada kelompok perempuan, maka akan kita melakukan analisis dengan menggunakan kerangka alur kerja analisis gender yang dikenal juga dengan *Gender Analysis Pathway* (GAP).

4.1 Analisis Kebijakan Responsif Gender

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Program

Perwako No. 49 tahun 2020 tentang Kebiasaan Pola Hidup Baru dibuat dengan tujuan mengatur perilaku stakeholders dalam berinteraksi sosial pada masa tatanan hidup baru. Hal ini dimaksudkan agar semua stakeholders bisa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat sesuai dengan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19. Selain penerapan protokol kesehatan, kebijakan ini juga mengatur tentang pembatasan aktifitas sosial, ekonomi, pendidikan dan bidang kehidupan lainnya. Meskipun dibatasi, namun masyarakat sangat dimungkinkan untuk kembali beraktifitas seperti sebelumnya, untuk kembali memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Tantangan terberat dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah perilaku masyarakat yang beragam dan tingkat kepatuhan yang masih relatif rendah.

Semenjak bulan Maret hingga Juni 2020, Kota Padang sudah menerapkan Pembatasan Berskala Besar (PSBB) pada setiap bidang kehidupan. Kondisi ini tentunya memberikan dampak tersendiri bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. PSBB yang diberlakukan bertepatan dengan bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1441H, menyebabkan perubahan pada tingkah laku masyarakat Kota Padang yang biasanya melakukan mudik lebaran ke kampung. Namun, tahun ini masyarakat Kota Padang yang banyak berasal dari daerah luar terpaksa menjalankan ibadah puasa dan lebaran berjauhan dan keluarga dan kampung asal. Dilain sisi, banyaknya masyarakat Kota Padang yang terpaksa kehilangan pekerjaan karena kondisi PSBB ini. Seperti, pedagang *pabukoan* yang mengaku tidak bisa berjualan dengan leluasa dan penghasilan menjadi menurun secara signifikan. Keluhan ini tidak hanya dari pedagang makanan *pabukoan*, namun pedagang di pasar yang berjualan pakaian, kue kering dan perlengkapan puasa serta hari lebaran juga mengalami penurunan penghasilan. Kondisi inilah yang mendorong pemerintah daerah untuk merumuskan strategi agar bisa kembali memperbaiki perekonomian masyarakat.

Data dari Dinas Pasar Kota Padang, menyebutkan bahwa 65% pedagang di pasar tradisional di Kota Padang adalah perempuan. Tentunya menjadikan perempuan sebagai pemikul peran ganda dalam keluarga, yaitu sebagai ibu/ istri dan sebagai pencari nafkah keluarga. Kondisi ini memaksa perempuan untuk terus beraktifitas di luar rumah agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga kita banyak melihat kelompok perempuan yang bekerja di luar rumah dengan taruhan kondisi kesehatan mereka.

Pada Perwako No.49 tahun 2020 juga bertujuan untuk mengembalikan kondisi masyarakat pada kondisi kehidupan sosial sebelum adanya pandemi. Namun perbedaannya adalah dengan lebih meningkatkan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, dan tentunya ini bukanlah hla yang mudah. Sasaran dari kebijakan ini adalah semua stakeholders, mulai dari pemerintah daerah melalui semua OPD, pelaku usaha, dan tentunya masyarakat secara umum.

4.1.2 Data Pembuka yang Terpilah

Data pembuka yang dimaksud adalah ketersediaan data awal yang memberikan gambaran atau informasi mengenai kondisi tertentu. Pada konteks Perwako No. 49 tahun 2020, maka kondisi yang dimaksud adalah kondisi penyebaran Virus Covid-19 di Kota Padang. Data pembuka awal yang digunakan untuk merumuskan kebijakan atau strategi dalam mencegah penyebaran Virus Covid-19 adalah sebag berikut;

Tabel 4.1
Data Pembuka Kondisi Kasus Covid-19 di Kota Padang
Pada Bulan April-September 2020

	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September
Kasus Suspek	145	202	239	251	149	273
Konfirmasi positif	202	314	571	606	872	951

Sumber; Dinas Kesehatan Kota Padang, 2020

Dari data pada tabel 4.1 dapat kita ketahui bahwa kasus penduduk Kota Padang yang terkonfirmasi positif selalu mengalami peningkatan. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, yang dimaksud dengan kasus suspek adalah orang yang mengalami infeksi saluran pernafasn akut (ISPA) maksimal 14 hari setelah melakukan perjalanan pada daerah dengan zona merah atau pernah berinteraksi dengan orang terkonfirmasi positif. Sedangkan konfirmasi positif merupakan orang yang secara gejala menunjukkan tanda-tanda Covid-19 dan hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR baik dengan gejala ataupun tanpa gejala.

Data awal ini yang mendorong pemerintah daerah untuk harus merumuskan strategi yang tepat agar bisa menghentikan laju penyebaran Covid-19 dan yang lebih utama mengembalikan interaksi sosial dan aktifitas kehidupan masyarakat guna pemenuhan

kebutuhan. Pemerintah Kota Padang melalui OPD terkait terus melakukan pembaharuan data secara berkala. Untuk sektor ekonomi, Dinas Tenaga Kerja menyatakan bahwa hingga Agustus 2020 terdapat 218 masyarakat Kota Padang yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Tentunya data ini juga dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan strategi pemerintah dalam mengatasi persoalan kompleks yang diakibatkan oleh penyebaran Virus Covid-19.

Namun, yang belum bisa ditampilkan oleh OPD adalah data terpilah. Data terpilah penyebaran Covid-19 merupakan kondisi penyebaran virus pada masyarakat yang ditampilkan secara terpisah, sehingga bisa memberikan data jumlah perempuan dan laki-laki yang terkena virus covid-19 ini. Satu-satunya data terpilah dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang seperti berikut;

Tabel 4.2
Data Terpilah Kasus Covid-19 di Kota Padang

	April		Mei		Juni		Juli		Agustus	
	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK
Kasus Suspek	68	77	114	88	110	129	132	119	108	41
Konfirmasi positif	103	99	119	195	281	290	368	238	459	413

Sumber; DP3AP2KB Kota Padang, 2020

Data pada tabel 4.2 menggambarkan kondisi perkembangan kasus Virus Covid-19 pada bulan April hingga bulan Agustus 2020. Data tersebut ditampilkan secara terpisah antara perempuan dengan laki-laki. Dari tabel tersebut terlihat bahwa kasus Covid-19 selalu mengalami penambahan kasus setiap bulannya. Untuk penambahan kasus pada perempuan, lebih banyak dari pada pasien laki-laki yaitu sebesar 0,91% hingga 1,6%. Tujuan dari adanya pemilahan data secara gender adalah untuk memudahkan merumuskan strategi pencegahan penyebaran Covid-19 khususnya di Kota Padang.

Dengan adanya pemetaan kasus berbasis gender, maka pemerintah daerah bisa mengidentifikasi bagaimana kondisi masyarakat Kota Padang antara kelompok masyarakat perempuan dengan laki-laki, baik kondisi sebagai pasien maupun sebagai masyarakat yang terkena dampak dari pandemi Virus Covid-19 ini.

Sayangnya, baru OPD DP3AP2KB Kota Padang yang menyediakan data terpilah penyebaran kasus Covid-19. Sehingga masih sangat sulit untuk mengidentifikasi kondisi kelompok perempuan dan laki-laki setelah adanya pandemi Covid-19 ini. Pemerintah daerah Kota Padang melalui OPD yang ada sudah cukup komitmen dalam menyediakan data dampak dari penyebaran Virus Covid-19. Seperti data yang dikeluarkan oleh Kantor Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang mengenai jumlah masyarakat yang terkena dampak Virus Covid-19 dari jenis pekerjaannya, seperti pada tabel 4.3 berikut;

Tabel 4.3
Jenis Pekerjaan yang Terdampak Virus Covid-19
berdasarkan Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah yang Terdampak (%)	Keterangan
Pedagang Kebutuhan Pokok	45	Pedagang bahan makanan pokok tidak terdampak terlalu besar, karena meskipun ruang gerak pedagang dan pembeli dibatasi namun masyarakat selalu membutuhkan barang-barang kebutuhan dasar/ pokok, sehingga pedagang kebutuhan pokok selalu bisa jual-beli barang meskipun terjadi penurunan daya beli masyarakat.
Transportasi Umum	83	Masyarakat dengan pekerjaan sebagai penyedia jasa angkutan umum sangat merasakan dampak dari berkembangnya Virus Covid-19. Hal ini disebabkan karena masyarakat mulai membatasi aktifitas di luar rumah, sehingga banyak masyarakat yg tidak lagi bepergian apalagi jika harus menggunakan jasa angkutan umum.
Usaha <i>Catering</i> atau Jasa Boga	64	Masyarakat yang bekerja pada jasa boga atau dikenal dengan <i>catering</i> cukup merasakan dampak dari penyebaran virus ini. Hal ini disebabkan karena adanya larangan untuk melakukan kegiatan secara offline/ langsung. Sehingga banyak kegiatan yang dilakukan dengan <i>daring</i> dan tanpa snack. Namun dilain sisi, ada rumah tangga yang justru memesan catering khusus untk kebutuhan pangan harian keluarga.

Lembaga kursus/ pelatihan	60	Lembaga pelatihan cukup merasakan dampak dari adanya Virus Covid-19, karena banyak yang terpaksa menghentikan sementara kegiatan pelatihannya karena adanya larangan berkegiatan di luar rumah.
Pemutusan Hubungan Kerja	75	Sangat banyak masyarakat yang terkena dampak PHK dari adanya pembatasan aktifitas akibat adanya virus Covid-19. PHK tidak hanya pada sektor privat namun juga pada bidang kerja ranah publik.

Sumber; Kantor Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang, 2020

Pada tabel 4.3 cukup memberikan gambaran bahwa banyak jenis pekerjaan yang terdampak akibat Virus Covid-19. Namun, tampilan data tersebut belumlah lagi disajikan dalam bentuk terpilah, sehingga masih sangat sulit diidentifikasi bagaimana dampak virus Covid-19 terhadap kelompok perempuan dan laki-laki.

Dari kondisi di lapangan maka diketahui bahwa data kondisi dampak penyebaran Virus Covid-19 di Kota Padang belum diidentifikasi secara terpilah dari setiap bidang kehidupan. Sehingga diasumsikan bisa menyulitkan stakeholders dalam merumuskan strategi pencegahan penyebaran virus yang berbasis gender.

4.1.3 Faktor Penyebab Kesenjangan Gender

Kesenjangan gender bisa terjadi karena adanya perbedaan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat yang diterima oleh kelompok perempuan dan laki-laki dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam kondisi pandemi saat ini, maka sangat terasa keterbatasan banyak pihak dalam memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini bisa dilihat dari;

a. Akses

Adanya pembatasan aktifitas sosial ekonomi masyarakat pada saat sekarang ini tentunya juga memberi kesulitan dalam akses terhadap layanan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Banyak dijumpai ibu-ibu yang masih melakukan kegiatan di area publik guna memenuhi kebutuhan keluarga. Seperti beraktifitas di pasar yang tak jarang mengabaikan protokol kesehatan. Selain itu, masih sering dijumpai perempuan yang mengakses layanan publik pada kantor pemerintah daerah daripada laki-laki. Seperti mengakses surat administrasi kependudukan. Sedangkan laki-laki lebih sering beraktifitas di luar rumah sebagai bentuk mencari nafkah/ bekerja. Kondisi ini

seharusnya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah melalui OPD terkait untuk memberikan arahan dan informasi kepada masyarakat mengenai tatacara berperilaku hidup sehat pada masa pandemi. Karena tidak semua masyarakat bisa selalu dituntut untuk beraktifitas di dalam rumah.

b. Kontrol

Kontrol merupakan salah satu bentuk cara masyarakat mengawasi kerja aparatur publik dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Pada masa pandemi saat ini, masyarakat sudah mulai acuh atau tidak peduli dengan kinerja pemerintah. Masyarakat lebih berfokus kepada upaya pemenuhan kebutuhan pokok keluarga daripada mengawasi dan mengkritik kinerja pemerintah. Kondisi ini seharusnya menjadi faktor pendorong bagi aparatur pemerintah daerah dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja layanan pad sektor publik.

Namun, kenyataan yang ditemukan adalah pada masa pandemi sekarang layanan publik justru mengalami kendala dan menyebabkan masalah baru. Pada masa pandemi saat ini, layanan publik dituntut untuk berbasis digital sehingga tetap bisa diakses oleh masyarakat. Namun keterbatasan pemerintah dari segi sumber daya aparatur dan sarana pendukung yang masih terbatas menjadi penyebab lemahnya layanan publik selama masa pandemi. Ketidaktahuan masyarakat terhadap cara layanan publik yang berbasis digital juga menjadi penyebab buruknya layanan selama masa pandemi.

c. Partisipasi

Pada penerapan kebijakan yang berbasis gender, maka juga harus didukung oleh partisipasi kelompok laki-laki dan perempuan secara aktif. Kenyataan yang ditemukan di Kota Padang semasa pandemi, kelompok perempuan cenderung acuh dengan kinerja layanan publik yang ada. Bahkan himbaun pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan sering tidak dilaksanakan. Kebanyakan dari mereka menyatakan bahwa justru merasa tidak nyaman atau terganggu jika harus menggunakan masker setiap waktu. Perilaku masyarakat yang kurang disiplin ini tentunya membuat terhambatnya pencapaian kinerja publik.

d. Manfaat

Masa pandemi saat sekarang ini diharapkan masyarakat tetap bisa merasakan manfaat dari layanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Namun, karena rendahnya partisipasi masyarakat maka manfaat yang dirasakan juga tidak maksimal. Masyarakat lebih banyak merasakan dampak negatif atau hambatan dalam pemenuhan kebutuhan

selama masa pandemi. Karena keterbatasan ruang gerak, maka masyarakat mulai abai dengan manfaat layanan publik. Mereka lebih disibukkan dengan pemenuhan kebutuhan keluarga.

4.2. Formulasi Kebijakan Responsif Gender

Perumusan Strategi Responsif Gender

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang menjadi OPD yang diberikan kewenangan untuk mengurus permasalahan sosial yang berbasis gender guna mewujudkan kesetaraan gender pada semua bidang kehidupan masyarakat. Beberapa upaya yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Padang dalam mewujudkan kesetaraan gender pada masa pandemi adalah;

1. Sosialisasi bahaya Virus Covid-19

Kegiatan sosialisasi dilakukan tidak hanya kepada kelompok perempuan, namun juga laki-laki. Sosialisasi dilakukan dengan cara koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait, seperti pemerintah kecamatan, kelurahan, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat dan pihak lainnya. Sosialisasi yang pernah dilakukan oleh DP3AP2KB adalah dengan bekerjasama dengan posyandu yang ada pada tiap kecamatan di Kota Padang. Sosialisasi pada posyandu dilakukan dengan tujuan agar bisa memberikan informasi lebih rinci khusus kepada para ibu-ibu. Alasan DP3AP2KB menasar posyandu adalah karena peran ibu yang akan meneruskan kebiasaan hidup sehat dengan protokol kesehatan atau dikenal juga dengan protokol Covid-19.

2. Membuat *flyer* atau selebaran yang berisi informasi mengenai kebiasaan pada pola tatanan hidup baru dengan menerapkan protokol Covid-19. Selebaran ini dibagikan kepada setiap kecamatan dan kelurahan agar bisa diteruskan kepada masyarakat setempat. Harapannya, selebaran ini bisa memberikan informasi mengenai protokol kesehatan yang harus dipatuhi dan dijalankan secara konsisten.

3. Mendorong masyarakat, khususnya perempuan untuk mengurangi aktifitas pada tempat-tempat keramaian. DP3AP2KB memberikan contoh salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat agar tetap bisa memenuhi kebutuhan pokok keluarga tanpa harus bepergian ke tempat keramaian (pasar). Salah satu caranya adalah dengan membuat Posko Barter Kebutuhan Pangan. Posko ini bisa dibuat pada komplek perumahan, tingkat RT, atau kelurahan. Pada posko ini bisa disediakan kebutuhan pokok keluarga terutama kebutuhan pangan, yang bisa ditukar atau barter dengan bahan

pangan lainnya. Dengan metode ini diharapkan bisa mengurangi aktifitas para ibu untuk pergi berbelanja bahan pangan ke pasar.

Dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh DP3AP2KB, maka dirasa bahwa upaya tersebut masih bersifat relatif. Belum memberikan dampak yang sangat signifikan dalam perubahan pola perilaku antara perempuan dengan laki-laki dalam menerapkan protokol kesehatan atau protokol Covid-19 secara konsisten.

4.3 Rencana Aksi Responsif Gender

Sebagai *Leading Sector* dalam pemberdayaan perempuan agar bisa mewujudkan kesetaraan gender, maka DP3AP2KB Kota Padang telah melakukan berbagai macam upaya untuk mewujudkannya. Dalam merumuskan dan mewujudkan hal tersebut tentunya tidak terlepas dari kerjasama yang baik yang dilakukan oleh DP3AP2KB dengan berbagai stakeholders. Rencana aksi yang sudah dilakukan oleh DP3AP2KB diantaranya;

1. Koordinasi dengan kecamatan mengenai data masyarakat yang suspec dan terkonfirmasi positif Covid-19. Data ini akan diidentifikasi secara terpisah antara perempuan laki-laki.
2. Kerjasama dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Padang untuk menambah informasi dan pengetahuan mengenai upaya hidup sehat pada masa pandemi. Hal ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada DP3AP2KB dalam merumuskan strategi pencegahan penyebaran Virus Covid-19 khususnya pada kelompok perempuan.
3. Kerjasama dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk bisa lebih dekat dengan orang tua siswa dalam mensosialisasikan pentingnya hidup sehat dengan protokol Covid-19.
4. Kerjasama dengan tokoh masyarakat agar bisa melakukan pendekatan dan lebih diterima oleh masyarakat dalam memberikan informasi dan sosialisasi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kondisi pandemi akibat penyebaran Virus Covid-19 saat ini sudah seharusnya menjadi tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, sektor swasta dan juga masyarakat umum. Keterlibatan semua stakeholders diharapkan bisa mengurangi dan mencegah penyebaran Virus Covid-19 khususnya di Kota Padang. Mengingat adanya kelompok rentan dalam penyebaran virus covid-19 ini, maka tentu diharapkan ada strategi yang juga berbeda dalam upaya pencegahan penyebaran virus ini pada kelompok rentan tersebut. Salah satu kelompok rentan pada penyebaran Virus Covid-19 adalah kelompok perempuan. Hal ini dikarenakan perempuan cenderung memiliki imunitas atau daya tahan tubuh yang lebih lemah dibandingkan laki-laki. Mengingat perempuan masih banyak melakukan aktifitas pekerjaan dan kegiatan sosial di luar rumah, maka diperlukan strategi khusus agar bisa mencegah penyebaran Covid-19 pada kelompok perempuan. OPD yang menjadi *leading sector* dalam upaya ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang.

DP3AP2KB Kota Padang sudah mengupayakan perumusan kebijakan dan aksi untuk mengurangi dan mencegah penyebaran Virus Covid-19. Upaya tersebut antara lain dengan membangun kerjasama dan koordinasi dengan stakeholders dan pelibatan aktif masyarakat setempat.

Namun, upaya ini dinilai masih relatif dan belum menggambarkan kondisi yang strategis teknis. Sehingga dirasa bahwa DP3AP2KB belum memiliki upaya khusus dalam pencegahan penyebaran Virus Covid-19 khususnya pada kelompok perempuan. Kebijakan Perwako No.49 Tahun 2020 sebagai dasar dalam melakukan aktifitas sosial ekonomi masyarakat dalam pola tatanan hiudp baru seharusnya dijadikan sebagai rujukan bagi DP3AP2KB dalam merumuskan strategi pencegahan penyebaran Virus Covid-19 pada kelompok perempuan.

5.2 Saran

Berdasarkan kondisi di lapangan maka ada beberapa hal yang disarankan;

1. DP3AP2KB bekerjasama dengan OPD terkait guna melakukan perumusan kebijakan, strategi dan aksi pencegahan penyebaran Virus Covid-19.

2. DP3AP2KB mendorong OPD lain untuk mendata kasus suspec dan terkonfirmasi positif pada kasus Covid-19 secara terpilah berbasis gender.
3. DP3AP2KB melakukan pendekatan aktif secara langsung kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Moleong, Lexy J. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- _____. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Muhadjir, N. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin.
- Nazir, Moh. 1983. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup
- Thoha, Miftah. 2018. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Jakarta: PT. Buku Seru

Regulasi

Peraturan Wali Kota Padang NO 49 Tahun 2020 tentang Pola Hidup Baru pada Masa pandemi

Web

www.jpnn.com/news/27-Juli-2020/21.10 wib

www.corona.padang.go.id/27-Juli-2020/21.23 wib

**FORMAT CURRICULUM VITAE
IDENTITAS DIRI**

Nama : Wewen Kusumi Rahayu, S.A.P, M.Si
 NIP/NIK : 19860514 201012 2 006
 NIDN : 0014058601
 Tempat /Tanggal Lahir : Koto Baru/ 14 Mei 1986
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Status Perkawinan : Menikah
 Agama : Islam
 Golongan/Pangkat : III C/ Penata
 Jabatan Fungsional Akademik : Lektor
 Alamat Rumah : Jl. Muaro No. 217 Jr. Simpang, Nagari Koto Baru, Kec. Kubung,
 kab. Solok
 Alamat Email : wewenkr@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI			
Tahun Lulus	Jenjang	Perguruan Tinggi	Jurusan/Bidang Studi
2010	S2	Universitas Diponegoro	Administrasi Publik
2008	S1	Universitas Diponegoro	Administrasi Publik

PELATIHAN PROFESIONAL		
Tahun	Pelatihan	Penyelenggara
2012	Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS Gol III	LPMP Provinsi Sumatera Barat
2011	Pelatihan Metodologi Penulisan Proposal Pengabdian Masyarakat Program Mono Tahun	LPMP Universitas Andalas
2011	Pelatihan Metode Pembelajaran SCL	Jurusan Antropologi, FISIP, Univ. Andalas
2010	Pelatihan Penguasaan Kompetensi Pedagogik dengan Bobot Materi setara 400 menit	Fakultas Teknologi Pertanian, Univ. Andalas

PENGALAMAN JABATAN		
Jabatan	Institusi	Tahun...sd...
Anggota Gugus Kendali Mutu	Jurusan Administrasi Publik, Fisip, Univ. Andalas	2018 - sekarang
Pembina Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Negara	Jurusan Administrasi Negara, FISIP, Univ. Andalas	2013 - 2014
Tim Seleksi Mahasiswa Calon Penerima Beasiswa Peningkatan Akademik	FISIP, Univ. Andalas	2013
Pengelola Jurnal On Line FISIP	FISIP, Univ. Andalas	2012
Divisi Publikasi dan Penerbitan Labor Administrasi Negara	Jurusan Administrasi Negara, FISIP, Univ. Andalas	2011

Sekretaris Tim Akreditasi Jurusan Adminitrasi Negara	Jurusan Administrasi Negara	2011
---	-----------------------------	------

PENGALAMAN PENELITIAN			
Tahun	Judul Penelitian	Jabatan	Sumber Dana / Nominal
2019	Analisis Model <i>Human Governance dalam Implementasi Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh</i> ”	Ketua	Dipa Fisip
2018	Penerapan <i>Good Mining Practice</i> Pada Pertambangan Emas PT. INEXCO Jaya Makmur (IJM) Pasca Lahirnya UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah	Anggota	BOPTN Unand
2018	Implementasi Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Bukittinggi dalam Mewujudkan Kota Berwawasan Lingkungan	Ketua	DIPA Fisip
2017	Penerapan Dimensi Etika Publik dalam Merumuskan Kebijakan Berbasis Gender pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	Ketua	DIPA Fisip
2016	Analisis Pelaksanaan Kebijakan Standar Mutu Pendidikan Internasional pada Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Padang	Ketua	DIPA Universitas
2016	Analisis Peran <i>Stakeholders</i> dalam Pembentukan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Nagari di Kabupaten Solok Selatan	Anggota	DIPA Universitas
2015	Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan dan investasi di kantor pelayanan perizinan dan penanaman modal (KP3M) Kabupaten Solok	Ketua	DIPA FISIP
2014	Analisis kebijakan investasi dalam mendorong pertumbuhan investasi di kabupaten solok	Anggota	DIPA FISIP
2013	Analisis Etika Publik dalam Kompetensi Pejabat Publik	Ketua	DIPA FISIP
2012	Abilitas Inspektorat dalam Menjalankan Fungsi	Anggota	DIPA

	Pengawasan ditinjau dari Disain Organisasi		
--	--	--	--

KARYA TULIS ILMIAH

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2017	<i>Collaborative of Stakeholders in Formation and Development Nagari-Owned Enterprise</i>	Jurnal <i>Policy & Governance Review</i> ; 2580-339w, Vo. 1, Issue 3 ISSN: 2580-3395 eSSN: 2580-4820 link: http://journal.iapa.or.id/pgr
2017	Analisis Penerapan Dimensi Etika Publik dalam Merumuskan Kebijakan Berbasis Gender pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	Prosiding Semnas Ilmu Administrasi Negara FIS UNP 2017 ISBN: 978-602-507000-0-6
2016	Analisis Implementasi Kebijakan Standar Mutu Pendidikan Internasional pada SMK di Kota Padang	Prosiding Semnas Ilmu Administrasi II FIS UNP 2016 ISBN: 978-602-72961-1-4
2016	Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah)	Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik (JAKPP) Edisi Vol 2 NO 1 2016, hal 93-108 e-ISSN 2527-6476
2012	Nilai Budaya dalam <i>Human Governance</i>	<i>E- Proceeding Innovative Governance at ASPA Indonesia International Seminar and IAPA Annual Conference 2012.</i> e-ISBN: 978-602-203-444-5

PESERTA KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM		
Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara
2017	Pemakalah pada “Seminar Nasional Ilmu Administrasi Negara FIS 2017”	Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FIS, UNP
2016	Pemakalah pada “Seminar Nasional Ilmu Administrasi Negara FIS UNP 2016”	Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FIS, UNP
2013	Pemakalah pada “Konferensi IAPA 2013 dan Kongres Pertama IAPA”	IAPA dan Univ. Indonesia
2012	Pemakalah pada “Seminar Internasional ASPA Indonesia dan Konferensi Tahunan IAPA 2012 dengan Tema Pemerintahan Inovatif”	IAPA dan Univ. Brawijaya
2011	Pemakalah pada “Simposium Hasil Penelitian dan Inovasi Pendidikan, Pusat Penelitian Kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional”	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2011	Pemakalah pada “Konferensi Administrasi Negara/ Publik IV dan Seminar Nasional dengan tema Penguatan Administrasi Negara/ Publik untuk Kesejahteraan Rakyat”	IAPA dan Univ. Hasanuddin
2011	Peserta pada “Seminar Sosialisasi Hasil Survei Nasional KPPOD 2011 Tata Kelola Ekonomi Daerah dan Pembangunan Iklim Usaha di Indonesia”	KPPOD

KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN MASYARAKAT			
Tahun	Judul Pengabdian	Jabatan	Sumber Dana / Nominal
2018	Pelatihan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Nagari tentang Reklamasi Lahan Pasca Tambang di Nagari Koto Tuo Kecamatan Nagari Kabupaten Sijunjung	Anggota	BOPTN
2018	Pelatihan Sistem Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Prima pada Aparatur Kelurahan di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang	Ketua	DIPA Fisip
2017	Pelatihan teknik Analisis Dukungan Stakeholders dalam Pengambilan Keputusan Publik oleh Aparatur Kelurahan Air Tawar Timur Kecamatan Padang Utara Kota PADANG	Ketua	Dipa Fisip
2017	Pelatihan Pengembangan Aparatur di Kecamatan Pauh Kota Padang	Anggota	Dipa Fisip
2016	Pengabdian dan Sosialisasi Jurusan Ilmu Administrasi Negara ke SMAN 1 Kota Jambi Provinsi Jambi	Anggota	Dipa Fisip
2015	Pelatihan Pelayanan Berkualitas bagi Aparatur Perangkat Nagari Se-Kabupaten Tanah Datar	Anggota	Dipa Fisip
2014	Pelatihan Pengelolaan Organisasi Siswa Intra Sekolah di SMAN 9 Kota Padang	Anggota	Dipa fisip
2013	Diseminasi Kelompok pada Siswa SMA untuk Mewujudkan Kelompok-kelompok Belajar yang Efektif	Anggota	
2013	Pengenalan Konsep dan Aplikasi Model Implementasi Program dalam Rangka Meminimalisir Kegagalan Implementasi Program Pemerintah pada Aparatur Pemerintah Nagari di Nagari mungo Kec. Luak, Kab. Lima Puluh Kota	Anggota	
2012	Sosialisasi Metode <i>Gender Analysis Pathway</i> (GAP) dalam Pembuatan Program Kerja Kec. Kubung, Kab. Solok	Ketua	DIPA Fakultas
2012	Pengabdian dan Sosialisasi Jurusan Administrasi Negara di SMAN 1 Guguk Kab. 50 kota	Anggota	
2011	Pengabdian Jurusan Administrasi Negara di Kec. Kolok, Kota Sawah Lunto	Anggota	

Padang, 1 November 2020
Yang Menyatakan

Wewen Kusumi Rahayu,S.AP,M.Si
NIP. 198605142010122006

IDENTITAS ANGGOTA PENELITI

1.	Nama Lengkap	Dewi Anggraini,S.IP,M.Si
2.	Jenis Kelamin	Perempuan
3.	Jabatan Fungsional	Lektor
4.	N I P	198110282010122004
5.	NIDN	0028108109
6.	Tempat/Tanggal Lahir	Koto Tuo/28 Oktober 1981
7.	email	Dewianggraini_81@yahoo.com
8.	Nomor Telepon/HP	085271811756
9.	Alamat Kantor	Gedung FISIP, Kampus UNAND, Limau Manis, Padang
10.	Nomor Tel/Faks	(0751) 71266
11.	Lulusan yang telah dihasilkan	S1 = 40 Orang
12.	Mata Kuliah Yang Pernah Diampu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen dan Resolusi Konflik 2. Politik dan Birokrasi 3. Sistem Perwakilan Politik 4. Birokrasi di Indonesia 5. Reformasi Birokrasi 6. Korupsi dan Politik 7. Sistem Pemerintahan Desa dan Nagari 8. Politik Pemerintahan Desa dan Nagari 9. Pembangunan Regional dan Otonomi Daerah 10. Komunikasi Politik 11. Gender dan Gavernance 12. Legal Drafting 13. Perempuan dan politik 14. Pembangunan Partisipatif 15. Pengantar Ilmu Pemerintahan 16. Sistem Politik indonesia 17. Integrasi Politik 18. Integritas dan Anti Korupsi 19. Kewarganegaraan 20. Pancasila 21. Etika Politik 22. Pengantar Filsafat Ilmu

		23. Good Governance and Clean Governmnet
--	--	--

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Andalas	Universitas Andalas	
Bidang Ilmu	Ilmu Politik	PWD/Pemusatan Politik Lokal dan Otonomi Daerah	
Tahun Masuk-Lulus	1999-2004	2006-2008	
Judul Skripsi/Thesis	Proses Pembuatan Kebijakan Pemekaran Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung	Formasi Gerakan Petani dalam Merebut Lahan yang dikuasai oleh Balai Pembibitan ternak unggul sapi potong (BPTU SP) Padang Mangatas dan respon Pemerintah Lokal	
Nama Pembimbing	Drs. Bakaruddin Rasyidi, MS Drs. Syaiful M.Si	Prof. Dr. Afrizal, MA Drs. Bakaruddin Rasyidi, M.S	

	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1.	2019	Pola Kekerasan Dalam Konflik Pertambangan di Sumatera Barat (Studi Kabupaten Solok dan Kabupaten Pasaman).	BOPTN	29.000.000
2.	2019	Kajian Keamanan Kampus Unand	BOPTN	10.000.000
3.	2018	Penerapan <i>Good Mining Practice</i> Pada Pertambangan Emas PT. Inexo Jaya Makmur (Ijm) Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan	BOPTN	30.000.000

		Daerah.		
4.	2017	Proses Peralihan Kewenangan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Serta Implikasinya Terhadap Pelaksanaan <i>Good Mining Practice</i> Di Provinsi Sumatera Barat	PNBP	12.000.000
5.	2016	Respon pemerintahan Daerah Terhadap Aktivitas Tambang Emas Ilegal Di Kabupaten Sijunjung Pasca Dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	DIPA FISIP	8.000.000
6.	2016	Optimalisasi Penerapan Politik Pengelolaan Sumber Daya Alam Terhadap Potensi Konflik Tambang Emas Ilegal Di Kabupaten Sijunjung	DIPA Unand	12.500.000
7.	2015	Politik uang dalam pemilihan umum 2014 di Kota Padang	DIPA Unand	7.000.000
8.	2014	Respon Pemerintahan Lokal Terhadap Gerakan Perlawanan Petani Di Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten 50 Kota Dalam Merebut Lahan Yang dikuasai Oleh Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Potong (BPTU SP) Padang Mangatas	DIPA Unand	12.500.000,-
9.	2013	Optimalisasi Penerapan Pakta Integritas (PI) Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Aparatur Pemerintahan Dan Masyarakat Dalam Mencegah Praktek Korupsi Di Pemerintahan Daerah (Studi di Kabupaten Dharmasraya, kota Pekanbaru dan Kota Medan)	Dikti	50.000.000,-
10.	2013	Desentralisasi dan Pembangunan Demokrasi Lokal : Studi tentang Model Partisipasi Masyarakat dan Daya Tanggap Pemerintahan Nagari Lasi” tahun 2013	DIPA Unand	7.500.000
11.	2010	Mekanisme Sitem Politik	DIPA	7.500.000

		Kota Padang (Studi Penyaluran Aspirasi Politik Pedagang Relokasi Pasar Raya Padang)	Unand	
12.	2010	Formasi Gerakan Petani dalam Merebut Lahan yang dikuasai oleh Balai Pembibitan ternak unggul sapi potong (BPTU SP) Padang Mangatas dan respon Pemerintah Lokal	Penelitian Mandiri	5.000.000